

KETERBUKAAN GLOBAL DAN DIMENSI KEAMANAN BALI: KAJIAN TRANSNASIONALISME DALAM PERSPEKTIF LIBERALISME

Anak Agung Gede Agung Widagda Ari Prabawa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, e- mail: anak.agung54@ui.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v14.i01.p06>

ABSTRAK

Artikel ini menyelidiki bagaimana dinamika keterbukaan lintas batas atau transnasionalisme membentuk lanskap keamanan Bali, baik pada ranah ancaman tradisional maupun non-tradisional. Bertumpu pada pendekatan kualitatif deskriptif model Miles dan Huberman serta kerangka teori liberalisme hubungan internasional, kajian ini mengungkap bahwa pergerakan masif wisatawan asing, pekerja digital, dan migran lintas negara melahirkan ancaman berlapis yang tidak homogen sifatnya. Pada dimensi tradisional, ancaman berwujud kejahatan terorganisir lintas batas seperti peredaran gelap narkoba, penyalahgunaan dokumen keimigrasian, dan tindakan kriminal berjangkauan. Pada dimensi non-tradisional, ancaman mencakup erosi identitas budaya Bali, ketimpangan ekonomi-sosial antara warga lokal dan komunitas asing, serta degradasi ekologis yang dipicu oleh ekspansi industri pariwisata yang tidak terkendali. Studi kasus warga Rusia dan Ukraina di Bali memperjelas bahwa kehadiran komunitas asing dalam skala besar tanpa tata kelola yang memadai memunculkan gesekan sosial dan beban administratif tersendiri. Artikel ini berargumen bahwa pendekatan kolaboratif multipihak yang berakar pada prinsip liberalisme, yakni kerja sama internasional melalui kerangka UNTOC, revitalisasi lembaga adat, dan implementasi pariwisata berkelanjutan, merupakan kunci untuk menjamin ketahanan keamanan Bali di tengah arus globalisasi.

Kata Kunci: *Transnasionalisme; Keamanan Tradisional; Keamanan Non-Tradisional; Bali; Liberalisme; Pariwisata Berkelanjutan*

ABSTRACT

This article investigates how transnational dynamics shape Bali's security landscape across both traditional and non-traditional threat dimensions. Drawing on a descriptive qualitative framework informed by Miles and Huberman's analytical model and liberal internationalist theory, the study reveals that large-scale movements of foreign tourists, digital workers, and cross-border migrants produce layered and heterogeneous security challenges. Traditional threats manifest as organized transnational crimes including narcotics trafficking, immigration document abuse, and networked criminal activity. Non-traditional threats encompass the erosion of Balinese cultural identity, socio-economic disparities between local residents and foreign communities, and ecological degradation driven by unchecked tourism expansion. A case study of Russian and Ukrainian nationals in Bali clarifies that the unmanaged presence of large foreign communities generates social friction and significant administrative burdens. The article argues that a multi-actor collaborative approach grounded in liberal principles, specifically international cooperation through the UNTOC framework, revitalization of customary institutions, and sustainable tourism implementation, is essential to ensure Bali's security resilience amid accelerating globalization.

Keywords: *Transnationalism; Traditional Security; Non-Traditional Security; Bali; Liberalism; Sustainable Tourism*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pulau Bali telah lama berdiri sebagai salah satu simpul paling dinamis dalam jaringan pariwisata global, menawarkan perpaduan antara kekayaan budaya, lansekap alam yang khas, dan keterbukaan sosial yang menjadi daya pikat tersendiri bagi jutaan pengunjung internasional. Posisi strategisnya sebagai pertemuan lintas budaya, aliran modal, dan pergerakan manusia menjadikan Bali bukan sekadar tujuan wisata, melainkan arena nyata dari proses-proses transnasional yang kompleks. Arus transnasional tersebut meliputi mobilitas wisatawan mancanegara, masuknya investasi lintas batas, serta penetrasi nilai-nilai dan pola hidup global yang secara bertahap namun pasti mengubah tatanan sosial masyarakat setempat.

Di satu sisi, keterbukaan Bali terhadap dunia luar memberikan manfaat nyata berupa pertumbuhan ekonomi yang ditopang sektor pariwisata. Di sisi lain, keterbukaan yang sama melahirkan tekanan serius terhadap stabilitas keamanan, baik dalam dimensi tradisional yang berkaitan dengan ketertiban hukum maupun dalam dimensi non-tradisional yang menyangkut keselamatan budaya, kohesi sosial, dan kelestarian lingkungan.¹

Dalam perspektif ilmu hubungan internasional, arus transnasional merupakan ekspresi nyata dari proses globalisasi yang melibatkan aktor-aktor non-negara, mulai dari individu, kelompok masyarakat, hingga korporasi multinasional yang melampaui batas kedaulatan teritorial. Dinamika semacam ini melahirkan kategori ancaman keamanan baru yang melampaui paradigma konvensional berbasis ancaman militer dan kini hadir dalam wajah yang lebih beragam, mencakup ranah sosial, ekonomi, budaya, dan penegakan hukum. Bali, sebagai kawasan dengan keterbukaan tinggi terhadap arus internasional, menghadapi kerentanan berlapis terhadap dampak-dampak tersebut. Kehadiran wisatawan asing dalam volume besar kerap berkorelasi dengan peningkatan potensi pelanggaran hukum, degradasi lingkungan, serta marginalisasi komunitas lokal.² Lebih jauh, gerak mobilitas budaya yang dibawa arus globalisasi juga berpotensi menggerus nilai-nilai leluhur Bali, sementara ekspansi kawasan hijau demi kepentingan pariwisata mengancam keberlanjutan ekologi pulau ini.³

Dalam kerangka keamanan kontemporer, kedaulatan suatu wilayah tidak lagi cukup diukur dari ketahanannya menghadapi ancaman militer semata. Kemampuan daerah dalam mempertahankan ketahanan sosial, melestarikan warisan budaya, menegakkan hukum secara efektif, serta melindungi lingkungan hidup di tengah tekanan global yang terus berubah menjadi tolok ukur baru yang tidak kalah penting. Respons terhadap tantangan ini menuntut pendekatan keamanan yang lebih inklusif

¹ I. N. Subadra, "Toxic Tourists in Paradise-Bali: Cultural Disrespects, Crimes, and Misconducts," *Tourism and Hospitality Research* 25, No. 3 (2024): 2.

² G. Hidayat, A. G. Winarta, T. I. Putri, dan T. Oktavia, "Analisis Dampak Perilaku Wisatawan Asing di Bali Berhubungan dengan Pelanggaran Norma Sosial dan Budaya," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 3, No. 1 (2025): 2.

³ I. A. P. Widiati dan I. Permatasari, "Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Lingkungan pada Fasilitas Penunjang Pariwisata di Kabupaten Badung," *Kertha Wicaksana* 16, No. 1 (2022): 36.

dan adaptif, yang tidak hanya bergantung pada kerja sama antarnegara,⁴ tetapi juga mengandalkan penguatan kapasitas lokal dan sinergi penegakan hukum lintas batas.⁵

Kajian akademis mengenai keamanan Bali dalam konteks transnasionalisme masih tergolong terbatas. Penelitian yang ada lebih banyak berfokus pada isu-isu pariwisata dan pertumbuhan ekonomi, sementara implikasi transnasionalisme terhadap stabilitas keamanan secara menyeluruh belum mendapat perhatian yang sepadan. Artikel ini hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan menawarkan analisis sistematis tentang bagaimana arus lintas negara membentuk ulang peta keamanan Bali, sekaligus merumuskan kerangka strategi kolaboratif yang relevan untuk menghadapinya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pertanyaan penelitian yang menjadi fokus kajian ini adalah Bagaimana transnasionalisme memengaruhi kondisi keamanan di Bali, khususnya dalam konteks keamanan tradisional maupun non-tradisional?

1.3 Tujuan Penulisan

Artikel ini memiliki tiga sasaran utama: pertama, menganalisis dampak transnasionalisme terhadap keamanan tradisional dan non-tradisional di Bali; kedua, mengeksplorasi studi kasus konkret tentang implikasi kehadiran komunitas asing terhadap stabilitas lokal; dan ketiga, merumuskan strategi kolaboratif lintas aktor yang mampu menjawab tantangan keamanan yang ditimbulkan oleh arus transnasional.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengandalkan metode kualitatif deskriptif dengan mengacu pada model analisis Miles dan Huberman. Pilihan metode ini dilandasi oleh kebutuhan untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang proses transnasionalisme dan dampaknya terhadap kondisi lokal Bali, alih-alih sekadar mengukur variabel secara kuantitatif.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga jalur: (1) penelaahan literatur akademis yang relevan dengan topik kajian; (2) analisis dokumen resmi pemerintah dan laporan organisasi internasional, termasuk instrumen UNTOC; serta (3) studi pustaka komparatif tentang fenomena transnasionalisme di konteks Bali. Proses analisis data mencakup empat tahap berurutan, yaitu reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan, pengelompokan tematik berdasarkan konsep teoritis, interpretasi analitik untuk menghubungkan temuan dengan teori, dan penarikan kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian.

Kerangka analisis yang digunakan bertumpu pada perspektif liberalisme dalam hubungan internasional, yang memandang keterhubungan lintas batas sebagai medium kerja sama, pertukaran pengetahuan, dan pertumbuhan bersama. Namun demikian, liberalisme juga mengakui bahwa keterbukaan yang tidak terkelola dapat

⁴ James N. Mitchell, "Transnational Organised Crime in Indonesia: The Need for International Cooperation," *Brawijaya Law Journal* 3, No. 2 (2016): 177.

⁵ A. A. S. N. Indradewi dan A. A. I. V. Arifiani, "Efektifitas Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Pelanggaran Visa di Bali," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, No. 2 (2021): 892.

membuka celah bagi berbagai bentuk kejahatan transnasional, gesekan identitas, dan fragmentasi sosial.⁶

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Transnasionalisme sebagai Fenomena Sosial-Global di Bali

Transnasionalisme yang berlangsung di Bali bukan sekadar sirkulasi wisatawan dan modal, melainkan sebuah proses sosial yang mengubah secara mendasar cara masyarakat lokal berinteraksi, beridentitas, dan membangun hubungan dengan dunia luar. Posisi Bali sebagai salah satu magnet pariwisata terkemuka di Asia Pasifik mempercepat terjadinya pertemuan antara berbagai latar budaya, sistem nilai, dan gaya hidup yang sebelumnya tidak saling bersentuhan. Proses ini melahirkan tatanan sosial baru yang jauh lebih cair dan dinamis dibandingkan generasi sebelumnya.

Kehadiran aktor-aktor non-negara dalam kehidupan sehari-hari Bali merupakan manifestasi nyata dari apa yang Keohane dan Nye (1977) sebut sebagai *interdependensi kompleks*, yakni suatu kondisi di mana entitas internasional saling terikat dalam jaringan ketergantungan yang tidak lagi bisa dikelola melalui logika kekuasaan semata.⁷ Teori liberalisme dalam hal ini menawarkan perspektif yang lebih optimistis dibandingkan realisme, dengan melihat keterbukaan dan institusionalisasi kerja sama sebagai jalan menuju stabilitas jangka panjang.

Namun di balik narasi pertumbuhan dan keterbukaan itu, terdapat sisi yang sering diabaikan dalam diskursus pariwisata Bali. Banyak elemen budaya Bali yang mengalami transformasi menjadi produk komersial untuk konsumsi wisatawan. Ritual keagamaan, pertunjukan seni, dan tradisi adat mulai dipadatkan dan disesuaikan dengan selera pasar global sehingga makna spiritualnya menjadi tergerus. Penelitian di Desa Sebatu, Tegalalang menunjukkan bahwa kerajinan tangan dan praktik budaya lokal semakin diposisikan sebagai komoditas yang memiliki nilai tukar, bukan lagi sebagai ekspresi identitas komunal semata.⁸

Gelombang digital nomad yang menjadikan Bali sebagai pangkalan kerja jarak jauh turut berkontribusi pada pergeseran sosial ini.⁹ Kawasan Canggu yang semula merupakan desa agraris kini bertransformasi menjadi pusat komunitas pekerja digital internasional, membawa serta kenaikan harga properti dan perubahan drastis pada pola konsumsi dan interaksi warga setempat.¹⁰ Fenomena ini mempertegas bahwa globalisasi tidak semata-mata berarti kemakmuran yang merata, melainkan juga redistribusi ketimpangan yang kadang lebih menguntungkan pendatang dibandingkan penduduk asli.¹¹

Dengan demikian, transnasionalisme di Bali harus dipahami sebagai proses yang bersifat paradoks: membuka peluang pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan

⁶ R. Muhammad, A. Roziqin, D. Susilo, dan A. A. Romadhan, "The Challenges of Intergovernmental Organizations in Combating Transnational Crime: An Indonesian Perspective," *Cakrawala* 18, No. 2 (2024): 231.

⁷ Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye, *Power and Interdependence: World Politics in Transition* (Boston: Little, Brown and Company, 1977), 9.

⁸ N. L. P. S. Dewi, "Komodifikasi Budaya dalam Industri Kerajinan Tangan di Desa Sebatu, Tegalalang, Gianyar," *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3, No. 1 (2020): 20.

⁹ R. Susilo, I. G. Nugraha, dan D. A. Putri, "Mapping of Migration Motivation from Digital Nomads in Bali," *Jurnal Kajian Bali* 15, No. 1 (2025): 115.

¹⁰ N. L. P. Prabawati, "Desa Canggu, Bali: Sebuah Basecamp bagi Digital Nomads?" *Jurnal Kepariwisata Indonesia* 15, No. 2 (2020): 61.

¹¹ Hitchcock, "Tourism and Total Crisis," 111.

tekanan baru terhadap stabilitas sosial, integritas budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Tantangan terbesar Bali bukan pada pilihan antara keterbukaan atau isolasi, melainkan pada kemampuan mengelola keterbukaan itu sendiri secara cerdas dan berkeadilan.

3.2 Keamanan Tradisional: Bali di Bawah Tekanan Kejahatan Lintas Batas

Dimensi keamanan tradisional Bali mengalami tekanan yang semakin nyata seiring meningkatnya intensitas arus transnasional. Sebagai destinasi wisata internasional yang bersifat terbuka, Bali menjadi rentan terhadap infiltrasi jaringan kejahatan lintas negara yang memanfaatkan kelonggaran mobilitas internasional. Dari total 50 kasus narkoba yang tercatat di Bali pada tahun 2022, sekitar 10 di antaranya melibatkan warga negara asing, mengindikasikan bahwa ancaman keamanan tradisional telah melampaui batas yurisdiksi lokal dan bersifat transboundary.¹²

Mitchell secara tegas menyatakan bahwa ancaman kejahatan terorganisir lintas negara tidak dapat ditangani melalui tindakan unilateral suatu negara. Dibutuhkan arsitektur keamanan kolektif yang mengandalkan koordinasi multilateral dan pertukaran intelijen antarlembaga.¹³ Argumen ini sejalan dengan prinsip *collective security* yang menjadi salah satu pilar teori liberalisme, bahwa keamanan merupakan produk kerja sama, bukan hasil dominasi satu pihak.

Preseden kerja sama bilateral yang dapat dijadikan rujukan adalah kemitraan Indonesia-Australia dalam menanggulangi terorisme transnasional. Model ini terbukti mampu membangun infrastruktur keamanan bersama yang tidak sekadar reaktif, tetapi juga preventif dalam menekan risiko-risiko keamanan yang bersifat lintas batas.¹⁴

Selain kejahatan terorganisir, peningkatan mobilitas ekspatriat dan pekerja digital di Bali juga menimbulkan berbagai persoalan hukum tersendiri, antara lain penyalahgunaan visa, ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan, dan pelanggaran regulasi keimigrasian.¹⁵ Dalam menghadapi kompleksitas ancaman semacam ini, sistem keamanan lokal Bali perlu bertransformasi dengan melibatkan institusi adat sebagai komponen keamanan berbasis komunitas yang bertumpu pada kearifan lokal.¹⁶

Kehadiran pekerja jarak jauh internasional di Bali didorong oleh kombinasi antara infrastruktur digital yang memadai, biaya hidup yang kompetitif, dan daya tarik budaya-spiritual Bali yang khas.¹⁷ Namun, integrasi mereka ke dalam komunitas lokal kerap bersifat parsial, menciptakan enklave sosial yang tidak sepenuhnya

¹² Dewi, Wiranata, dan Abigail, "Peningkatan Intensitas Kejahatan Transnasional," 6.

¹³ Mitchell, "Transnational Organised Crime in Indonesia," 181.

¹⁴ S. Y. Simanjuntak dan T. C. Utomo, "Analisis Kerja Sama Bilateral Indonesia dengan Australia dalam Penanggulangan Terorisme sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir (2002–2015)," *Journal of International Relations Diponegoro* 2, No. 3 (2016): 119.

¹⁵ P. L. O. Permadhi dan I. W. W. Udytama, "Problematisasi Hukum Terkait Digital Nomads Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Indonesia," *Jurnal Hukum Saraswati* 6, No. 1 (2025): 3.

¹⁶ A. A. P. Sugiantiningsih dkk., "Konstruksi Konsep Pengelolaan Keamanan Nasional Berbasis Masyarakat Adat di Bali," *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora* 6, No. 3 (2024): 3.

¹⁷ T. O. Wibowo, "Dynamic of Migration Lifestyle and Settlement of Nomad in Bali, Indonesia," *The Indonesian Journal of Geography* 56, No. 2 (2024): 293.

bersinggungan dengan kehidupan warga asli dan berpotensi melemahkan kapasitas pemerintah daerah dalam merespons ancaman keamanan secara holistik.¹⁸

3.3 Keamanan Non-Tradisional: Erosi Ekologi, Budaya, dan Kohesi Sosial Bali

Sementara ancaman keamanan tradisional berkaitan dengan kejahatan dan ketertiban hukum, dimensi keamanan non-tradisional menyoroti fondasi yang jauh lebih dalam dari kehidupan masyarakat Bali, yaitu identitas budaya, keseimbangan ekologis, dan ikatan sosial yang menjadi ciri khas pulau ini. Tekanan dari arus transnasional terhadap ketiga ranah tersebut bersifat kumulatif dan berlangsung secara gradual, sehingga kerap tidak disadari hingga dampaknya benar-benar terasa.

Pada ranah degradasi lingkungan, ekspansi pariwisata yang tidak terkendali telah menghasilkan tekanan ekologis yang melampaui daya dukung alam Bali. Utama dkk. (2024) mendokumentasikan bahwa industri pariwisata, khususnya hotel-hotel mewah, mengonsumsi hingga 65 persen dari total pasokan air bersih Bali, sebuah proporsi yang secara langsung menyebabkan kelangkaan air bagi penduduk lokal dan mengancam sektor pertanian.¹⁹ Selain tekanan sumber daya air, konstruksi masif infrastruktur wisata di kawasan pesisir dan perbukitan seperti di Canggu, Seminyak, dan Ubud telah mengubah tata ruang secara drastis, menghancurkan koridor ekologis, dan mengurangi tutupan hijau yang berfungsi sebagai penyangga ekosistem.

Persoalan pengelolaan limbah juga mencapai titik kritis. Bali kini menghasilkan sekitar 1.200-ton sampah per hari, dengan volume yang melonjak signifikan pada musim kunjungan wisata puncak. Akumulasi limbah di kawasan pantai dan destinasi wisata populer tidak hanya merusak estetika, tetapi juga menimbulkan risiko kesehatan dan kerusakan habitat laut yang berdampak jangka panjang. Januar menyoroti bahwa meskipun pemerintah Indonesia telah merumuskan *Decarbonization Roadmap for the Tourism Sector*, implementasinya di lapangan masih menghadapi hambatan sistemik berupa lemahnya koordinasi antarlembaga dan resistensi pelaku industri yang berorientasi pertumbuhan jangka pendek.²⁰

Surya Dharma dan Pustika Sukma dalam kajian hukum lingkungannya menggarisbawahi bahwa Peraturan Daerah Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali telah menyediakan landasan normatif untuk pariwisata berwawasan lingkungan. Namun, efektivitas regulasi tersebut sangat bergantung pada sinergi aktif antara pemerintah provinsi, pelaku industri pariwisata, dan komunitas lokal yang sejauh ini belum terbangun secara optimal.²¹

Pada ranah erosi budaya dan identitas, tekanan transnasionalisme terhadap warisan budaya Bali bersifat multidimensi. Di satu sisi, komersialisasi budaya yang masif telah mengubah ritual sakral menjadi komoditas pertunjukan. Di sisi lain, interaksi intensif dengan wisatawan asing telah melahirkan hibridisasi budaya yang dalam jangka panjang berpotensi menggerus distingsi kultural Bali sebagai entitas yang berbeda dan unik. Fenomena *toxic tourists'* yang dikaji Subadra memperlihatkan

¹⁸ I. P. H. Pradnyana, "Tourism Security in the Age of Overtourism: A Qualitative Investigation in Bali," *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)* 7, No. 1 (2025): 97.

¹⁹ I. G. B. R. Utama, I. N. Suardhana, I. G. Sutarya, dan N. P. D. Krismawintari, "Assessing the Impacts of Overtourism in Bali: Environmental, Socio-Cultural, and Economic Perspectives on Sustainable Tourism," *TourismSpectrum: Diversity & Dynamics* 1, No. 2 (2024): 1-15.

²⁰ R.J anuar, "Implementation and Challenges of Sustainable Tourism Programs in Bali," *Bali Tourism Journal* 8, No. 2 (2024): 33-37.

²¹ I. G. M. Surya Dharma dan D. Pustika Sukma, "Penerapan Asas Kelestarian dan Keberlanjutan untuk Mewujudkan Pariwisata Bali yang Berwawasan Lingkungan," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 8, No. 4 (2024): 51-60.

bagaimana perilaku wisatawan bermasalah yang tidak menghormati norma adat, memasuki ruang-ruang sakral secara tidak pantas, atau melanggar etika lokal, secara langsung mengancam integritas budaya yang menjadi keunggulan komparatif Bali sebagai destinasi wisata.²²

Mahadewi mencatat bahwa *nomadic tourism* yang berkembang pesat pasca pandemi COVID-19 telah menyumbang pada persoalan *over-development* khususnya di Ubud dan Canggu. Kawasan-kawasan ini mengalami kepadatan yang melampaui daya dukungnya, dengan konsekuensi berupa penurunan kualitas pengalaman wisata, berkurangnya ruang publik komunal, dan melemahnya rasa kepemilikan warga lokal atas ruang hidupnya sendiri.²³

Gede Oka dan Prawira menemukan bahwa sebagian besar warga Desa Adat Kuta di Kabupaten Badung menyatakan kekhawatiran yang tinggi terhadap dampak pembangunan pariwisata terhadap kelestarian adat dan tata nilai komunal. Responden yang diwawancarai menyuarakan keprihatinan bahwa generasi muda semakin terpapar gaya hidup konsumeristik yang dibawa wisatawan asing, sementara nilai-nilai gotong royong dan partisipasi dalam upacara adat mengalami penurunan partisipasi.²⁴

Pada ranah ketimpangan sosial dan ekonomi, kehadiran komunitas asing berskala besar di Bali secara tidak langsung memperparah disparitas ekonomi yang sudah ada. Noviarini dan Samputra (2024) menemukan bahwa dominasi pekerja digital asing dalam ekosistem ekonomi Bali pasca pandemi telah menyebabkan pergeseran struktural dalam pola konsumsi dan permintaan hunian. Harga sewa properti di kawasan favorit digital nomad melonjak jauh melampaui kemampuan daya beli penduduk lokal, sehingga mendorong *gentrifikasi* yang perlahan-lahan meminggirkan warga Bali dari ruang-ruang ekonomi yang sebelumnya mereka kuasai.²⁵

Dimensi keamanan non-tradisional ini juga berkaitan erat dengan ketahanan pangan dan sumber daya alam. Konversi lahan pertanian menjadi akomodasi wisata dalam skala masif mengancam sistem subak yang oleh UNESCO diakui sebagai Warisan Budaya Dunia sejak tahun 2012. Kehilangan sistem subak tidak hanya berarti berkurangnya produktivitas pertanian, tetapi juga erosinya suatu sistem tata air dan tata sosial yang telah menjaga keseimbangan ekologi dan keharmonisan komunal Bali selama berabad-abad. Widiati dan Permatasari (2022) menegaskan bahwa keberlanjutan pariwisata Bali hanya dapat dijamin apabila pengembangan sektor ini secara konsisten mempertimbangkan prinsip-prinsip lingkungan hidup dan tidak mengorbankan kapasitas ekologis daerah.²⁶

Dari seluruh uraian di atas, tergambar jelas bahwa keamanan non-tradisional Bali menghadapi ancaman yang sistemik dan saling terkait. Erosi lingkungan

²² Subadra, "Toxic Tourists in Paradise-Bali," 6.

²³ N. M. E. Mahadewi, "Nomadic Tourism, Wisata Pendidikan, Digitalisasi dan Wisata Event dalam Pengembangan Usaha Jasa Akomodasi Homestay di Destinasi Wisata," *Jurnal Kepariwisata* 17, No. 1 (2023): 5.

²⁴ A. Gede Oka dan A. Prawira, "Sikap Masyarakat Lokal Desa Adat Kuta Kabupaten Badung terhadap Dampak Pembangunan Pariwisata," *Jurnal Kepariwisata dan Hospitalitas* 7, No. 2 (2023): 335-350.

²⁵ N. Noviarini dan P. L. Samputra, "Digital Nomad and Analysis of Regional Economic Resilience of Tourism Sector in Bali Province after COVID-19 Pandemic," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 5, No. 5 (2024): 2110.

²⁶ Widiati dan Permatasari, "Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan," 39.

memperlemah daya dukung alam yang menjadi fondasi pariwisata; degradasi budaya mengikis daya tarik unik Bali sebagai destinasi autentik; sementara ketimpangan sosial-ekonomi merongrong kohesi komunal yang selama ini menjadi kekuatan rekat masyarakat Bali. Ketiga ancaman ini saling memperkuat satu sama lain dan tidak dapat ditangani secara parsial atau sektoral.

3.4 Studi Kasus: Komunitas Rusia dan Ukraina di Bali

Kehadiran warga Rusia dan Ukraina dalam jumlah signifikan di Bali pasca tahun 2022 menyediakan studi kasus yang kaya untuk memahami dinamika keamanan yang ditimbulkan oleh komunitas asing dalam skala besar. Laporan Kompas.id mencatat insiden penculikan dan perampokan bersenjata yang melibatkan warga Ukraina di kawasan Kuta Selatan, menimbulkan kekhawatiran serius terhadap ketertiban umum di salah satu destinasi wisata tersibuk Bali.²⁷

Dari sisi keamanan tradisional, temuan Dewi menunjukkan bahwa frekuensi dan durasi tinggal turis Rusia yang berkepanjangan berkontribusi pada pelanggaran norma adat dan tekanan struktural pada komunitas lokal.²⁸ Data resmi Kantor Wilayah Hukum dan HAM kuartal pertama 2025 mencatat 128 deportasi warga negara asing dari Bali, dengan Rusia dan Ukraina menempati posisi teratas akibat pelanggaran izin tinggal dan gangguan ketertiban.²⁹

Dari sisi keamanan non-tradisional, Dewi dan Barkati mengidentifikasi fenomena *gegar budaya* pada wisatawan Rusia yang berlama-lama di Bali, yang berdampak pada memudarnya kepekaan mereka terhadap batas-batas kesucian ruang ritual dan norma-norma komunal setempat.³⁰ Ginayani dkk. memperkuat temuan ini dengan mendokumentasikan bahwa pola perilaku sebagian wisatawan Rusia memunculkan tantangan nyata bagi aparat penegak hukum dan membutuhkan respons kebijakan yang lebih tegas dan spesifik agar pariwisata Bali tetap berada dalam jalur keberlanjutan.³¹

Sementara itu, studi Anadza, Trianti, dan Abd Batau mengungkap dimensi yang berbeda dari komunitas Ukraina di Bali. Sebagian besar dari mereka tidak berperilaku sebagai pengungsi yang mencari perlindungan, melainkan sebagai pelaku ekonomi yang membangun ekosistem bisnis tersendiri yang relatif tertutup dari interaksi dengan masyarakat lokal. Kondisi ini menciptakan ketegangan kepentingan ekonomi dan berpotensi memicu konflik alokasi ruang antara komunitas pendatang dan penduduk asli Bali.³²

Secara agregat, kasus kedua komunitas ini menegaskan bahwa tantangan yang ditimbulkan oleh kehadiran warga negara asing dalam jumlah besar bersifat multidimensi, menyentuh ranah keamanan tradisional maupun non-tradisional sekaligus, dan membutuhkan pendekatan tata kelola yang komprehensif.

²⁷ Kompas.id, "Polisi Bali Kejar Komplotan Perampok Bersenjata Api Asal Rusia," 11 Januari 2025, diakses 1 April 2025, <https://www.kompas.id/artikel/polisi-bali-kejar-komplotan-perampok-bersenjata-api-asal-rusia>.

²⁸ A. P. Dewi, "Dampak Sosial Budaya dari Kunjungan Wisatawan Rusia terhadap Masyarakat Bali," *Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora* 5, No. 3 (2023): 252.

²⁹ Bisnis.com, "Sebanyak 128 Warga Asing Dideportasi dari Bali Sepanjang Kuartal I/2025," 15 April 2025, diakses 1 April 2025, <https://bali.bisnis.com/read/20250415/537/1869475>.

³⁰ A. P. Dewi dan L. N. Barkati, "Fenomena Gegar Budaya pada Wisatawan Rusia yang Tinggal di Pulau Bali," *Kabuyutan* 3, No. 1 (2024): 15.

³¹ G. Ginayani dkk., "Russian Tourist Ethics in Bali: Law Enforcement Aspects toward Sustainable Tourism," *Russian Law Journal* 11, No. 3 (2023): 629.

³² Anadza, Trianti, dan Abd Batau, "From Refugees to Tourists," 572.

3.5 Strategi Kolaboratif Menghadapi Arus Negatif Transnasionalisme

Menghadapi kompleksitas tantangan transnasionalisme, Bali membutuhkan strategi tata kelola yang melampaui batas-batas sektor dan skala pemerintahan. Teori liberalisme menyediakan kerangka yang relevan di sini, dengan menekankan bahwa stabilitas dalam sistem yang saling tergantung hanya dapat dicapai melalui kerja sama kooperatif antarberbagai aktor, bukan melalui kontrol unilateral.

Dalam merespons ancaman keamanan tradisional, penguatan kemitraan lintas instansi dan lintas negara merupakan langkah yang tidak dapat ditunda. Koordinasi terpadu antara otoritas keimigrasian, kepolisian, dan lembaga adat lokal perlu diinstitutionalisasi sebagai mekanisme permanen, bukan hanya diaktifkan saat krisis terjadi. Studi Simanjuntak dan Utomo (2016) memberikan bukti bahwa kemitraan bilateral seperti yang dibangun Indonesia-Australia dalam menanggulangi terorisme transnasional dapat menjadi cetak biru bagi pengembangan arsitektur keamanan lintas negara yang lebih luas.³³

Keberhasilan operasi penangkapan buronan INTERPOL oleh petugas imigrasi Bali pada Juli 2023, yang menghasilkan penghargaan bagi 16 petugas, merupakan bukti konkret bahwa sinergi antara kapasitas lokal dan jaringan internasional mampu menghasilkan respons keamanan yang efektif.³⁴ Keberhasilan semacam ini perlu direplikasi secara sistematis melalui penguatan komitmen terhadap kerangka UNTOC sebagai fondasi hukum kerja sama multilateral.³⁵

Pada aspek keamanan non-tradisional, strategi yang diperlukan bersifat lebih struktural dan jangka panjang. Saraswati dan Putra mengajukan model *collaborative governance* yang menempatkan tripihak, yaitu pemerintah daerah, sektor swasta pariwisata, dan komunitas lokal, sebagai kolaborator setara dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pariwisata berkelanjutan yang sensitif terhadap aspek sosial-ekologis.³⁶

Sumertana menambahkan bahwa lembaga adat seperti desa pakraman tidak hanya berperan sebagai penjaga nilai spiritual dan sosial, tetapi juga sebagai aktor kunci dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan destinasi wisata. Integrasinya ke dalam kerangka tata kelola formal dapat menjadi jembatan antara kearifan lokal dan tuntutan modernitas global.³⁷

Lebih jauh, Bali memerlukan model tata kelola *multi-level governance* yang mengintegrasikan koordinasi lintas skala: dari komunitas adat di tingkat desa hingga forum diplomasi multilateral di tingkat internasional. Nilai-nilai kultural Bali seperti *Tri Hita Karana* yang mengajarkan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan, tidak hanya relevan sebagai pedoman lokal, tetapi juga dapat diproyeksikan sebagai kontribusi Bali terhadap wacana global tentang pembangunan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, Bali berpotensi bertransformasi dari objek tekanan globalisasi menjadi

³³ Simanjuntak dan Utomo, "Analisis Kerja Sama Bilateral," 120.

³⁴ Direktorat Jenderal Imigrasi, "Siaran Pers: Tangkap Buronan INTERPOL, 16 Petugas Imigrasi di Bali Terima Penghargaan Dirjen Imigrasi," 2 Juli 2023, diakses 1 April 2025, https://imigrasi.go.id/siaran_pers/2023/07/02.

³⁵ Boister, "The UNTOC and International Cooperation," 66.

³⁶ I. G. A. Saraswati dan I. W. Putra, "Collaborative Governance dalam Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan di Bali," *Jurnal Pengembangan Wilayah dan Lingkungan* 12, No. 2 (2024): 104.

³⁷ I. B. Sumertana, "Peran Otoritas Adat dalam Tata Kelola Pariwisata Bali," *Jurnal Kajian Bali* 15, No. 1 (2025): 47.

subjek aktif yang mendefinisikan ulang standar tata kelola pariwisata yang bertanggung jawab.³⁸

4. Kesimpulan

Transnasionalisme telah menempatkan Bali dalam posisi yang rentan sekaligus strategis: rentan karena keterbukaan yang menjadi kekuatan utamanya juga menjadi pintu masuk berbagai ancaman keamanan yang kompleks; strategis karena pengalaman Bali dalam menavigasi ketegangan antara globalisasi dan lokalitas dapat menjadi pelajaran berharga bagi kawasan lain di dunia. Ancaman tradisional yang berwajah kriminalitas lintas batas dan ancaman non-tradisional yang menggerogoti ekologi, budaya, dan kohesi sosial Bali bukan merupakan masalah terpisah, melainkan dua sisi dari satu koin yang sama: konsekuensi dari tata kelola transnasionalisme yang belum optimal.

Respons yang dibutuhkan bukan sekadar pengawasan keamanan yang lebih ketat atau pembatasan kunjungan wisata, melainkan rekalisasi menyeluruh terhadap cara Bali memosisikan dirinya dalam arus globalisasi. Hal ini menuntut kerja sama internasional yang diinstitutionalisasi melalui kerangka UNTOC, penguatan regulasi imigrasi yang responsif, revitalisasi lembaga adat sebagai aktor tata kelola yang diakui, serta komitmen kuat terhadap prinsip pariwisata berkelanjutan yang menempatkan kesejahteraan ekologi dan komunitas lokal sebagai prioritas, bukan kompensasi.

Pada akhirnya, masa depan Bali sebagai destinasi global yang lestari ditentukan oleh sejauh mana masyarakat dan pemerintah mampu menjadikan transnasionalisme sebagai peluang untuk memperkuat, bukan melemahkan, fondasi budaya dan ekologi yang selama ini menjadi sumber kekuatan dan daya tarik Bali di mata dunia.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Anadza, H., K. Trianti, dan M. F. B. Abd Batau. "From Refugees to Tourists: The Forfeit of Ukrainians' Forced Migration Status in Bali." *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)* 15, No. 2 (2025): 555–581.
- Bisnis.com. "Sebanyak 128 Warga Asing Dideportasi dari Bali Sepanjang Kuartal I/2025." 15 April 2025. Diakses 1 April 2025. <https://bali.bisnis.com/read/20250415/537/1869475>.
- Boister, N. "The UNTOC and International Cooperation." *Transnational Criminal Law Review* 4 (2025): 61–80.
- Dewi, A. P. "Dampak Sosial Budaya dari Kunjungan Wisatawan Rusia terhadap Masyarakat Bali." *Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora* 5, No. 3 (2023): 251–256.
- Dewi, A. P., dan L. N. Barkati. "Fenomena Gegar Budaya pada Wisatawan Rusia yang Tinggal di Pulau Bali." *Kabuyutan* 3, No. 1 (2024): 13–20.
- Dewi, N. L. P. S. "Komodifikasi Budaya dalam Industri Kerajinan Tangan di Desa Sebatu, Tegalalang, Gianyar." *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3, No. 1 (2020): 18–28.
- Dewi, P. V. A., I. M. A. Wiranata, dan S. Abigail. "Peningkatan Intensitas Kejahatan Transnasional Terkait Penyelundupan Narkotika di Bali oleh WNA (2022)." *Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, No. 1 (2024): 1–18.

³⁸ Widiati dan Permatasari, "Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan," 41.

- Direktorat Jenderal Imigrasi. "Siaran Pers: Tangkap Buronan INTERPOL, 16 Petugas Imigrasi di Bali Terima Penghargaan Dirjen Imigrasi." 2 Juli 2023. Diakses 1 April 2025. https://imigrasi.go.id/siaran_pers/2023/07/02.
- Gede Oka, A., dan A. Prawira. "Sikap Masyarakat Lokal Desa Adat Kuta Kabupaten Badung terhadap Dampak Pembangunan Pariwisata." *Jurnal Kepariwisata dan Hospitalitas* 7, No. 2 (2023): 335-350.
- Ginayani, G., P. W. A. Susyarini, N. K. Bagiastuti, I. K. Suparta, dan M. Ruki. "Russian Tourist Ethics in Bali: Law Enforcement Aspects toward Sustainable Tourism." *Russian Law Journal* 11, No. 3 (2023): 627-639.
- Hidayat, G., A. G. Winarta, T. I. Putri, dan T. Oktavia. "Analisis Dampak Perilaku Wisatawan Asing di Bali Berhubungan dengan Pelanggaran Norma Sosial dan Budaya." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 3, No. 1 (2025): 1-15.
- Hitchcock, M. "Tourism and Total Crisis in Indonesia: The Case of Bali." *Asia Pacific Business Review* 8, No. 2 (2001): 101-120.
- Inradewi, A. A. S. N., dan A. A. I. V. Arifiani. "Efektifitas Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Pelanggaran Visa di Bali." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, No. 2 (2021): 891-906.
- Januar, R. "Implementation and Challenges of Sustainable Tourism Programs in Bali." *Bali Tourism Journal* 8, No. 2 (2024): 33-37.
- Keohane, R. O., dan J. S. Nye. *Power and Interdependence: World Politics in Transition*. Boston: Little, Brown and Company, 1977.
- Kompas.id. "Polisi Bali Kejar Komplotan Perampok Bersenjata Api Asal Rusia." 11 Januari 2025. Diakses 1 April 2025. <https://www.kompas.id/artikel/polisi-bali-kejar-komplotan-perampok-bersenjata-api-asal-rusia>.
- Mahadewi, N. M. E. "Nomadic Tourism, Wisata Pendidikan, Digitalisasi dan Wisata Event dalam Pengembangan Usaha Jasa Akomodasi Homestay di Destinasi Wisata." *Jurnal Kepariwisata* 17, No. 1 (2023): 1-15.
- Miles, M. B., A. M. Huberman, dan J. Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 2014.
- Mitchell, J. N. "Transnational Organised Crime in Indonesia: The Need for International Cooperation." *Brawijaya Law Journal* 3, No. 2 (2016): 176-199.
- Muhammad, R., A. Roziqin, D. Susilo, dan A. A. Romadhan. "The Challenges of Intergovernmental Organizations in Combating Transnational Crime: An Indonesian Perspective." *Cakrawala* 18, No. 2 (2024): 229-250.
- Noviarini, N., dan P. L. Samputra. "Digital Nomad and Analysis of Regional Economic Resilience of Tourism Sector in Bali Province after COVID-19 Pandemic." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 5, No. 5 (2024): 2107-2119.
- Permadhi, P. L. O., dan I. W. W. Udytama. "Problematika Hukum Terkait Digital Nomads Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal Hukum Saraswati* 6, No. 1 (2025): 1-15.
- Pradnyana, I. P. H. "Tourism Security in the Age of Overtourism: A Qualitative Investigation in Bali." *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)* 7, No. 1 (2025): 95-108.
- Prabawati, N. L. P. "Desa Canggu, Bali: Sebuah Basecamp bagi Digital Nomads?" *Jurnal Kepariwisata Indonesia* 15, No. 2 (2020): 59-71.
- Saraswati, I. G. A., dan I. W. Putra. "Collaborative Governance dalam Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan di Bali." *Jurnal Pengembangan Wilayah dan Lingkungan* 12, No. 2 (2024): 102-116.

- Simanjuntak, S. Y., dan T. C. Utomo. "Analisis Kerja Sama Bilateral Indonesia dengan Australia dalam Penanggulangan Terorisme sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir (2002-2015)." *Journal of International Relations Diponegoro* 2, No. 3 (2016): 117-127.
- Subadra, I. N. "Toxic Tourists in Paradise-Bali: Cultural Disrespects, Crimes, and Misconducts." *Tourism and Hospitality Research* 25, No. 3 (2024): 1-15.
- Sugiantiningsih, A. A. P., I. M. Adiwidya Yowana, I. G. P. Yasa, I. M. Yunita, dan I. G. O. Saputra. "Konstruksi Konsep Pengelolaan Keamanan Nasional Berbasis Masyarakat Adat di Bali." *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora* 6, No. 3 (2024): 1-20.
- Sumertana, I. B. "Peran Otoritas Adat dalam Tata Kelola Pariwisata Bali." *Jurnal Kajian Bali* 15, No. 1 (2025): 45-60.
- Surya Dharma, I. G. M., dan D. Pustika Sukma. "Penerapan Asas Kelestarian dan Keberlanjutan untuk Mewujudkan Pariwisata Bali yang Berwawasan Lingkungan." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 8, No. 4 (2024): 51-60.
- Susilo, R., I. G. Nugraha, dan D. A. Putri. "Mapping of Migration Motivation from Digital Nomads in Bali." *Jurnal Kajian Bali* 15, No. 1 (2025): 112-130.
- Utama, I. G. B. R., I. N. Suardhana, I. G. Sutarya, dan N. P. D. Krismawintari. "Assessing the Impacts of Overtourism in Bali: Environmental, Socio-Cultural, and Economic Perspectives on Sustainable Tourism." *TourismSpectrum: Diversity & Dynamics* 1, No. 2 (2024): 1-15.
- Wibowo, T. O. "Dynamic of Migration Lifestyle and Settlement of Nomad in Bali, Indonesia." *The Indonesian Journal of Geography* 56, No. 2 (2024): 291-298.
- Widiati, I. A. P., dan I. Permatasari. "Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Development) Berbasis Lingkungan pada Fasilitas Penunjang Pariwisata di Kabupaten Badung." *Kertha Wicaksana* 16, No. 1 (2022): 35-44.